

**KAJIAN KENDALA KEBAHASAAN
PELAKSANAAN STANDARDISASI ADMINISTRASI DESA
BAGI PAMONG DESA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Oleh:
Suhardi**

Abstrak

*The purposes of this study were (1) to describe linguistically constraint done by village administrator, (2) to describe extra-linguistic factor caused it, and (3) to identify linguistically error on the village administration books. The subjects of this study were (1) village administration and the stake holder of the book village administration, that was A, B, and C model, and (2) documentation of the village administration such as public administration, population, and financial administration. The objects of this study were the opinion of village administrator and error of linguistic. The sample of this study was determined by quota sampling so that these were 19 villages (5% from all village in Yogyakarta special werea). The sample of documentation was taken from those villages and there were 171 books of village administration involved A, B, and C model. The determinate of sample of page book administration was done randomly. The instruments of the study were questioner and observative guide. The method used to analyze data were distributional and "padan" methods. The result of this study showed that the village administrator had linguistically constraint in applying of linguistically aspect of village administration. Village administrators very often had difficulties in choosing terms (1.3%) combine sentences (9.2%), choosing words (10.5%), and often had difficulties in choosing terms (5.3%). Village administrator some times had difficulties in choosing words (30.3%), choosing terms (38.9%), and combining sentences (32.9%). Another linguistically constraint was that the village administrators did not know about some administrative technical terms, such as *perihal*, *tentang*, *uraian*, and *keterangan*. These linguistically constraints were happen because of some factors, those were: mother tongues, using Javanese in conducting a meeting, propose, speak with another village administrator, and speak with guesses in the office, a government communication, and tackle of education village administration. Linguistically error found in the village administration books were (1) using capital letter (15.7%), (2) cutting of the words (20.3%), (3) using words (20.3%), (4) using of numeral (26.3%), (5) using of borrowing words (18.7%), (6) using of intonation symbols (29 %), (7) formation of words (16 %), (8) phrase structures (18.6%), (9) sentence structure (37.5%), and (10) choosing of words and terms (3.3%). In side of those, can be found the speaking error in the implementation of book administration, as the lexical or grammatical interference from the Javanese to Indonesian language.*

Key Words: Linguistically Constraint, Standardisation Implementation of Village Administration

Pendahuluan

Roestam (1992) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat membutuhkan terciptanya suatu pengertian dan pemahaman kebahasaan yang seragam. Penggunaan bahasa Indonesia yang belum baik dan benar telah menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap prinsip-prinsip serta hakikat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi aparatur pemerintah sendiri baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Komunikasi pemerintahan dengan rakyat di pedesaan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya karena mereka belum memahami atau sama sekali tidak memahami bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi desa, masih terdapat kendala kebahasaan. Demikian pula yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kendala kebahasaan itu sangat penting untuk diidentifikasi, dikodifikasi, dan dirumuskan dengan sebaik-baiknya agar pembinaan kebahasaan para pamong desa bisa dilaksanakan dengan tepat, terarah, dan mencapai hasil yang memuaskan.

Sehubungan dengan pernyataan di atas, permasalahan yang perlu mendapatkan pemecahan adalah kendala dan kesalahan kebahasaan yang dialami oleh pamong desa di DIY dalam pelaksanaan standardisasi administrasi desa sesuai dengan

Permendagri No. 5 Tahun 1991 serta faktor-faktor ekstralinguistik yang melatarbelakanginya. Deskripsi kendala dan kesalahan kebahasaan serta faktor ekstralinguistik yang melatarbelakangi tersebut bermanfaat sebagai masukan bagi depdagri dalam upaya pembinaan kemampuan berbahasa Indonesia para pamong desa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping itu, bermanfaat pula sebagai masukan bagi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah.

Telah ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan permasalahan di atas. Pertama, yang perlu dicermati ialah penelitian Rahayu, dkk. (1995) tentang pelaksanaan standardisasi administrasi kelurahan di Kotamadya Yogyakarta. Melalui penelitian itu di antaranya ditemukan bahwa masih banyak kesalahan yang terjadi dalam pengisian buku-buku administrasi kelurahan dan sebagian besar kelurahan (71,43%) masih menemui hambatan dalam hal itu. Penelitian Rahayu, dkk. tersebut belum mengungkapkan aspek-aspek kebahasaan, padahal pembinaan sistem administrasi desa tidak akan terlepas pada pembinaan kebahasaannya. Rumitnya format administrasi desa dan kurang jelasnya petunjuk pengisian yang ditemukan dalam penelitian itu perlu dikaji lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan kerumitan aspek-aspek kebahasaannya. Di samping itu, Nurgiyantoro, dkk.

(1992) menemukan bahwa bahasa Indonesia lisan para pamong desa di DIY, dalam pertemuan-pertemuan resmi, masih campur dengan pemakaian bahasa Jawa sebagai bahasa daerah. Alih kode dan campur kode sangat sering terjadi. Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Indonesia para pamong desa tersebut masih sangat kurang memadai. Pada penelitian berikutnya Nurgiyantoro, dkk. (1994) membuktikan bahwa kebakuan kebahasaan bahasa Indonesia para pamong desa di DIY pada surat-menyurat resmi masih sangat rendah. Di dalam penelitian itu Nurgiyantoro belum menyentuh penggunaan bahasa Indonesia para pamong desa pada penyelenggaraan administrasi desa, macam-macam hambatan kebahasaan yang terjadi, dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Mengingat betapa pentingnya arti administrasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, kiranya penelitian yang sangat mendalam mengenai hambatan kebahasaan, faktor-faktor yang melatarbelakangi, dan jenis-jenis kesalahan kebahasaan dalam administrasi desa itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa variasi bahasa yang bisa kita kenal sehari-hari di dalam suatu masyarakat tutur. Beberapa variasi bahasa itu bisa dipandang dari berbagai aspek, yaitu aspek: kronologi, geografi, sosial, fungsi, gaya, kultur, dan individu. Dalam peristiwa pemakaian bahasa Indonesia, baik lisan maupun tertulis, dapat

dijumpai adanya berbagai variasi kebahasaan seperti itu. Pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan pedesaan di DIY tentu saja merupakan salah satu contoh dari adanya variasi berbahasa yang ditentukan oleh beberapa faktor ekstralingual.

Penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur unsur-unsur bahasa Jawa seperti yang dilakukan oleh para pamong desa dalam rapat-rapat dan surat-menyurat, tentu saja merupakan contoh pemakaian bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor kedaerahan Jawa. Variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor fungsi dapat dibedakan atas beberapa ragam, seperti: beku, resmi atau formal, usaha, santai, dan akrab (Nababan, 1987:12). Beberapa variasi bahasa itu bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu ragam resmi dan takresmi atau yang sering juga disebut dengan istilah ragam formal dan informal. Bahasa resmi atau formal ialah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi. Bahasa takresmi atau informal ialah bahasa yang digunakan dalam situasi takresmi. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pamong desa dalam pelaksanaan administrasi desa, pemerintahan, rapat, dan surat-menyurat termasuk bahasa Indonesia resmi atau formal. Dalam situasi resmi semacam itu tentu saja harus digunakan bahasa Indonesia baku atau standar, yaitu sesuai dengan sistem kaidah kebahasaan, kaidah ejaan, dan kaidah peristilahan yang berlaku. Dengan demikian, pemakaian bahasa

tersebut sesuai dengan situasi dan fungsinya (lihat Moeliono & Soenjono Dardjowidjojo, 1988:17).

Ragam bahasa baku memiliki tiga ciri umum, yaitu sifat kemantapan dinamis, kecendekiaan, dan keseragaman kaidah (Moeliono & Soendjono Dardjowidjojo, 1988:13). Ciri-ciri kebakuan bahasa meliputi kebakuan ejaan (tulisan), lafal (lisan), kosa kata, peristilahan, dan tata bahasa (Suwito, 1983:153). Ciri kebakuan bahasa juga berkaitan dengan ciri fungsi bahasa seperti: untuk keperluan apa, di mana, kapan, kepada siapa, dan dalam situasi yang bagaimana. Sehubungan dengan itu, bahasa baku biasanya digunakan: (1) untuk komunikasi resmi, (2) wacana teknis, (3) pembicaraan di depan umum, dan (4) untuk berbicara dengan orang yang dihormati.

Keanekaragaman pemakaian bahasa bukan semata-mata akibat peristiwa di dalam bahasa itu sendiri, melainkan sebagai akibat wajar dari faktor-faktor lain di luar bahasa (Suwito, 1982:77-85). Faktor-faktor luar bahasa itu di antaranya: faktor individu, faktor sosial, dan faktor situasi. Faktor individu atau penutur bersifat fisis-fisiologis dan psikis-mentalistis. Faktor sosial berkaitan dengan adanya tata susunan kemasyarakatan sekelompok penutur bahasa. Faktor situasi berhubungan dengan tempat, waktu, dan keperluan berbahasa.

Cara Penelitian

Secara keseluruhan yang dijadikan lokasi penelitian ialah desa-desa se-DIY yang berjumlah 393 desa; Kabupaten Kulonprogo 88 desa, Kabupaten Bantul 75 desa, Kabupaten Sleman 86 desa, dan Kabupaten Gunungkidul 144 desa. Dalam lokasi penelitian itu populasi subjek penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu subjek penelitian personal dan subjek penelitian dokumen. Populasi subjek-personal ialah semua kepala desa dan pemegang buku administrasi desa di seluruh DIY. Populasi subjek-dokumen ialah semua buku administrasi desa model A, B, dan C yang ada di desa-desa di seluruh DIY.

Dari seluruh desa yang ada di DIY, diambil 19 desa sebagai sampel lokasi penelitian, yaitu: 4 desa dari Kabupaten Kulonprogo, 4 desa dari kabupten Bantul, 7 desa dari Kabupaten Gunungkidul, dan 4 desa dari Kabupaten Sleman. Sampel itu ditentukan secara kuota, yaitu 5% dari jumlah desa pada tiap-tiap kabupaten. Lebih lanjut, nama-nama desa yang dijadikan sampel penelitian dipilih secara acak. Dari setiap desa sampel secara purposif diambil 4 responden, yaitu pemegang buku administrasi desa (model A, B, dan C) dan Kepala Desa. Dengan demikian, dari 19 desa sampel diperoleh 76 responden. Di samping itu, dari setiap desa sampel diambil satu set buku administrasi desa yang terdiri dari model A, B, dan C sebagai sampel dokumen. Berdasarkan jumlah halaman

setiap buku administrasi pada tiap-tiap desa secara proporsional ditentukan halaman sampel sebesar 10%, yaitu 493 halaman. Penentuan halaman yang dijadikan sampel ditentukan secara acak, yaitu setiap kelipatan 10.

Penelitian ini pada dasarnya termasuk jenis penelitian survai yang dirancang secara deskriptif kuantitatif. Di dalam penelitian ini digunakan dua instrumen, yaitu angket dan tolok ukur kebakuan bahasa yang berupa kaidah sistem ejaan, pilihan kata dan istilah, tata pembentukan kata, dan tata pembentukan kalimat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi atau membaca, pencatatan, dan angket. Observasi atau membaca dan pencatatan digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa kesalahan berbahasa yang terjadi di dalam buku-buku administrasi desa dan angket digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pendapat pamong desa. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya adalah metode deskriptif. Metode itu secara garis besar dikembangkan dengan beberapa teknik analisis, yaitu: teknik distribusi, teknik kategorisasi, dan teknik deskripsi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan angket yang disebarakan dapat diketahui bahwa pamong desa di DIY pada umumnya merasa tidak mengalami kesulitan dalam memahami aspek kebahasaan, baik berkenaan

dengan bahasa secara umum maupun berkenaan dengan kalimat, kata dan istilah yang digunakan dalam Permendagri no. 5 tahun 1991 (BK-1), petunjuk pelaksanaan (BK-2), dan format isiannya (BK-3). Sehubungan dengan bahasa yang digunakan dalam BK-1, sebanyak 71,1% pamong desa menyatakan cukup dapat memahami, 26,3% pamong desa menyatakan mudah memahami, bahkan 0,3% menyatakan sangat mudah memahami. Hanya 1,3% pamong desa yang menyatakan sulit. Berikutnya, sehubungan dengan bahasa yang digunakan dalam BK-2, sejumlah 71,4% pamong desa menyatakan cukup dapat memahami dan 27,3% menyatakan mudah. Hanya 1% pamong desa yang menyatakan sulit. Sehubungan dengan bahasa yang digunakan dalam BK-3, 70,1% pamong desa menyatakan cukup dapat memahami, 28,6% menyatakan mudah, dan hanya 0,7% pamong desa yang menyatakan sulit. Dari 98,6% pamong desa yang menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan dalam BK-1, BK-2, dan BK-3, 82,5% adalah pamong desa yang berpendidikan SLTA dan SLTP. Sehubungan dengan **kalimat** yang digunakan dalam BK-1, BK-2, dan BK-3, dari 98,7% pamong desa yang menyatakan cukup dapat memahami dan mudah memahami, 82,1% di antaranya lulusan SLTA dan SLTP. Dari 97,8% pamong desa yang menyatakan bahwa **istilah-istilah** yang digunakan dalam BK-1, BK-2, dan BK-3 cukup dapat dipahami dan mudah

dipahami, 81,8% di antaranya lulusan SLTA dan SLTP. Lebih lanjut, dari 98,3% pamong desa yang menyatakan bahwa **kata-kata** yang digunakan dalam BK-1, BK-2, dan BK-3 cukup dapat dipahami dan mudah dipahami, 81,2% di antaranya lulusan SLTA dan SLTP. Hal itu sesuai dengan temuan bahwa pamong desa di DIY didominasi oleh lulusan SLTA dan SLTP, yaitu sejumlah 82,9%. Selebihnya, sejumlah 17,1% adalah lulusan sarjana, lulusan sarjana muda, dan lulusan SD.

Sehubungan dengan pendapat pamong desa tentang pemanfaatan aspek-aspek kebahasaan dalam pelaksanaan administrasi desa, sejumlah 47,4% pamong desa jarang mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat, 39,5% pamong desa jarang mengalami kesulitan dalam memilih kata, dan 51,3% pamong desa jarang mengalami kesulitan dalam memilih istilah. Dengan didasarkan pada reratanya, dapat dikatakan bahwa 46,1% pamong desa jarang mengalami kesulitan, baik dalam menyusun kalimat, memilih kata maupun memilih istilah. Lebih lanjut, dapat dilaporkan bahwa pamong desa kadang-kadang mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat (32,9%), memilih kata (30,3%), dan memilih istilah (32,9%). Pamong desa sering mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat (9,2 %), memilih kata (10,5 %), dan memilih istilah (5,3 %). Lebih lanjut, dalam penelitian ini ditemukan 1,3% pamong desa yang menyatakan sangat sering

mengalami kesulitan dalam memilih istilah. Walaupun pamong desa yang menyatakan sangat jarang dan jarang mengalami kesulitan dalam menerapkan aspek-aspek kebahasaan dalam melaksanakan administrasi desa 58,4%, pamong desa yang kadang-kadang, sering, dan sangat sering mengalami kesulitan yang sama juga cukup tinggi persentasenya, yaitu mencapai jumlah 40,7%. Dalam hal ini, ditinjau dari pendidikan formalnya, persentase di atas juga didominasi oleh pamong desa yang berpendidikan SLTA dan SLTP.

Berdasarkan uraian di atas, walaupun pamong desa pada umumnya mengakui tidak mengalami kesulitan dalam memahami aspek kebahasaan dalam BK-1, BK-2, dan BK-3, pada saat mereka harus melaksanakan pengisian buku-buku administrasi desa baik model A, B maupun C, kadang-kadang (32,0%), sering (8,3%), bahkan sangat sering (0,4%) mengalami kesulitan dalam penerapan aspek-aspek kebahasaan, baik dalam menyusun kalimat, memilih kata maupun memilih istilah yang tepat. Pamong desa yang sering mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat sebanyak 9,2%, memilih kata sebanyak 10,5%, dan memilih istilah sebanyak 5,3%. Sementara itu, yang sangat sering mengalami kesulitan dalam memilih istilah sebanyak 1,3%. Para pamong desa juga kadang-kadang mengalami kesulitan dalam memilih kata (30,3%), memilih istilah (32,9%), dan menyusun kalimat (32,9%). Di samping itu,

kendala kebahasaan lain yang dialami pamong desa adalah kebelumpahaman mereka terhadap beberapa istilah teknis administrasi, seperti istilah *perihal, tentang, uraian, keterangan*, yang menyebabkan timbulnya kesalahan dalam pengisian buku administrasi desa.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya kendala kebahasaan bagi pamong desa di DIY yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor individual dan faktor sosial. Faktor individual berkenaan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan dan kebiasaan berbahasa Jawa. Faktor sosial berkenaan dengan pengaruh kebiasaan berbahasa di lingkungan kepamongdesaan dan situasi kebahasaan dalam komunikasi pemerintahan.

Dalam memimpin rapat dan atau menyampaikan usul di dalam rapat, pamong desa yang menggunakan bahasa Indonesia secara murni mencapai rerata 51,3%, yaitu 50% ketika memimpin rapat dan 52,6% ketika menyampaikan usul di dalam rapat. Walaupun demikian, berdasarkan data yang dapat dikumpulkan, 27,6% pamong desa masih menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa Jawa dalam memimpin rapat; 15,8% atau 10,5% pamong desa menggunakan bahasa Jawa yang dicampur dengan bahasa Indonesia dalam memimpin rapat atau menyampaikan usul dalam rapat; dan 1,3% menggunakan bahasa Jawa secara murni

dalam memimpin rapat. Lebih lanjut dapat dilaporkan bahwa hanya 10,5% pamong desa yang menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan antarpamong dan hanya 13,2% yang menggunakan bahasa Indonesia ketika berbicara dengan tamu di kantor. Sebanyak 22,4% atau 30,3% pamong desa menggunakan bahasa Indonesia bercampur bahasa Jawa ketika berbicara antar pamong atau dengan tamu di kantor. Untuk pamong desa yang menggunakan bahasa Jawa bercampur bahasa Indonesia ketika berbicara antarpamong atau dengan tamu di kantor sebanyak 35,5% atau 46,1%. Pamong desa yang secara murni menggunakan bahasa Jawa ternyata juga cukup banyak, yaitu 27,6% ketika berbicara antarpamong dan 7,9% ketika berbicara dengan tamu di kantor. Sehubungan dengan latar belakang pendidikan formalnya, kebiasaan berbahasa seperti itu juga didominasi oleh lulusan SLTA dan SLTP.

Sebagian besar pamong desa (96,1%) berlatar belakang bahasa ibu bahasa Jawa. Walaupun pamong desa yang menguasai bahasa daerah selain bahasa Jawa 3,9% dan yang menggunakannya di rumah atau di kantor 2,6%, tentu saja keseringan penggunaannya tidak akan tinggi karena masyarakat lingkungannya sebagian besar tidak mengenal atau menguasai bahasa daerah yang bersangkutan, kecuali bahasa Jawa yang senantiasa digunakannya baik di rumah maupun di kantor.

Sebanyak 39,5% pamong desa berpendapat bahwa kepala desa menggunakan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Jawa, sementara untuk camat hanya 27,6 pamong desa yang berpendapat demikian. Seterusnya untuk bupati, hanya 19,7% pamong desa yang menyatakan demikian. Kecenderungan itu makin tampak jelas ditunjukkan bahwa menurut 5,3% pamong desa hanyalah kepala desa yang menggunakan bahasa Jawa bercampur bahasa Indonesia, sementara camat dan bupati dinyatakan tidak demikian. Situasi kebahasaan yang berkenaan dengan bahasa tulis ditunjukkan oleh surat-surat masuk. Sehubungan dengan itu, 94,7% pamong desa menyatakan bahwa surat masuk hampir tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa Jawa, kecuali hanya dinyatakan oleh 3,9% pamong saja.

Berdasarkan pengamatan terhadap data empirik dalam buku administrasi desa baik model A, B maupun C diketahui bahwa pamong desa banyak melakukan kesalahan pemakaian bahasa. Jenis kesalahan kebahasaan yang ditemukan ialah penggunaan huruf kapital, pemenggalan kata, penulisan kata, penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan unsur serapan, penggunaan tanda baca, pembentukan kata, struktur frase, struktur kalimat, dan pilihan kata/istilah.

Pada buku model A terdapat 83,7% kesalahan struktur kalimat dan pada buku model C ditemukan 28,7% kesalahan yang

sama. Pada buku model A ditemukan kesalahan penggunaan tanda baca sebanyak 56,4%, pada buku model B 18,1%, dan pada buku model C sebanyak 12,3%. Baik pada buku model A, B maupun C terdapat rerata kesalahan penulisan kata sebanyak 20,3%. Dalam buku model A terdapat 20,6% kesalahan; dalam buku model B terdapat 30% kesalahan; dan di dalam buku model C terdapat 10,2% kesalahan. Pada buku model A ditemukan kesalahan penulisan unsur serapan sebanyak 21,2% dan pada buku model C sebanyak 34,9%. Kesalahan struktur frase yang terdapat pada buku model A sebanyak 10,9%, pada buku model B sebanyak 28,8%, dan pada buku model C sebanyak 16,2%. Kesalahan berbahasa berikutnya ialah kesalahan pembentukan kata. Jenis kesalahan ini berkenaan dengan afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Pada buku model A terdapat total kesalahan pembentukan kata sebanyak 4,1%, pada buku model B terdapat 85,3%, dan pada buku model C terdapat 2,2%. Kesalahan penggunaan huruf kapital yang ditemukan sangat beragam. Baik pada buku A, B maupun C, rerata kesalahan penggunaan huruf kapital sebanyak 15,7%. Dari total pemakaian, pada buku model A terdapat 24,4% kesalahan, dalam buku model B terdapat 25,6% kesalahan, dan pada buku model C terdapat 10% kesalahan. Rerata kesalahan pemenggalan kata ditemukan sebanyak 9,5%.

Kesalahan pilihan kata jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan kesalahan pemilihan istilah. Baik pada buku A, B maupun C, kesalahan pilihan kata ditemukan sebanyak 1,7%, sedangkan kesalahan pilihan istilah sebanyak 15,6%. Kesalahan pilihan istilah paling banyak ditemukan pada buku model C, yaitu 37,7%, sedangkan pada buku model A 6,3% dan pada buku model B 2,9%.

Simpulan

Pamong desa mengalami kendala kebahasaan dalam menerapkan aspek kebahasaan dalam pelaksanaan administrasi desa. Pamong desa *sangat sering* mengalami kesulitan dalam memilih istilah (1,3%), menyusun kalimat (9,2%), memilih kata (10,5%), dan *sering* mengalami kesulitan memilih istilah (5,3%). Pamong desa *kadang-kadang* mengalami kesulitan memilih kata (30,3%), memilih istilah (32,9%), dan menyusun kalimat (32,9%). Di samping itu, kendala kebahasaan yang dialami pamong desa adalah kebelumahaman beberapa istilah teknis administrasi, seperti *perihal, tentang, uraian, keterangan*, yang menyebabkan timbulnya kesalahan pengisian buku administrasi desa.

Kendala kebahasaan yang dialami oleh pamong desa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. **Pertama**, faktor bahasa ibu, yaitu bahasa Jawa. **Kedua**, faktor kebiasaan berbahasa Jawa, baik dalam memimpin rapat, menyampaikan usulan dalam rapat,

berbicara dengan pamong desa yang lain maupun berbicara dengan tamu di kantor. **Ketiga**, faktor situasi kebahasaan dalam komunikasi pemerintahan yang tidak mendukung pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia baku. **Keempat**, faktor rendahnya pendidikan formal pamong desa, yaitu SLTA dan SLTP.

Kesalahan berbahasa yang ditemukan dalam buku administrasi desa ialah kesalahan: penggunaan huruf kapital (15,7%), pemenggalan kata (9,5%), penulisan kata (20,3%), penulisan angka dan lambang bilangan (26,3%), penulisan unsur serapan (18,7%), penggunaan tanda baca (29%), pembentukan kata (16%), struktur frase (18,6%), struktur kalimat (37,5%), dan pilihan kata dan istilah (3,3%). Di samping itu, juga kesalahan berbahasa yang berupa interferensi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam buku administrasi, baik interferensi leksikal maupun interferensi gramatikal.

Daftar Pustaka

- Anwar, Khaidir. (1995). *Beberapa aspek sosio-kultural masalah bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Depdagri. (1982). *Permendagri, no. 6, 7, dan 8 tahun 1982, tentang administrasi umum, administrasi penduduk, dan administrasi keuangan*. Jakarta: Depdagri
- Depdikbud. (1977). *Pedoman ejaan yang disempurnakan*. Jakarta: P3B
- Depdikbud. (1977). *Pedoman umum pembentukan istilah*. Jakarta: P3B

Depdikbud. (1993). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Anthon M. Moeliono. (1988). *Tata bahasa baku bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud dan Perum Balai Pustaka.

Nababan, P.W.J. (1987). *Ilmu pragmatik, teori dan penerapannya*. Jakarta: P2LPTK

_____. (1991). *Sosiolinguistik: Suatu pengantar*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

Ngadiran, dkk. (1995). *Studi eksploratif penggunaan waktu belajar pada siswa sekolah dasar pada desa tertinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta (tidak diterbitkan)

Burhan Nurgiyantoro, dkk. (1992). *Kajian pragmatik penggunaan bahasa lisan pamong desa se Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pertemuan resmi*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta (tidak diterbitkan)

_____. (1994). *Kajian kebakuan dan kepragmatikan bahasa surat pamong desa di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta (tidak diterbitkan)

Sugi Rahayu, dkk. (1995). *Pelaksanaan standardisasi administrasi di Kotamadya Yogyakarta*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta (tidak diterbitkan)

Soepardjo Roestam. (1992). "Bahasa Indonesia sebagai bahasa Komunikasi Pemerintah dan Pembangunan" dalam *Kontribusi Bahasa Indonesia IV*. A. Murad dan SRH Sitangkir (Penyunting). Jakarta: P3B Depdikbud

Dirgo Sabariyanto. (1993). *Mengapa disebut bentuk baku dan tidak baku? (kosakata)*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya

Suwito. (1982). *Pengantar awal sosiolinguistik, teori dan penerapannya*. Surakarta: Henary Offset.